

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Studi Empiris yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai suatu standar akuntansi pada UMKM serta faktor penghambatnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---------------------------|--|------------------------|--|
| 1 | Narsa <i>et al</i> (2012) | Mengungkap Kesiapan UMKM Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK-ETAP) Untuk Meningkatkan Akses Modal | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan kendala dalam penerapan SAK ETAP adalah tidak adanya catatan akuntansi yang mendukung dikarenakan pelaku UMKM belum memahami secara benar tentang bagaimana pencatatan akuntansi. UMKM beranggapan bahwa akuntansi itu sulit dan rumit serta tanpa laporan keuangan pun UMKM tetap dapat menjalankan usaha dan mendapatkan penghasilan. |
| 2 | Amoako (2013) | Praktik Akuntansi UKM: Studi Kasus Di Kumasi-Ghana | Deskriptif Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa UKM tidak menyimpan pembukuan yang tepat karena pemilik tidak menghargai kebutuhan untuk menyimpan catatan akuntansi, tidak memiliki pengetahuan akuntansi yang diperlukan dan menyalahkan biaya perekrutan profesional |

Dilanjutkan

Lanjutan

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | akuntansi. Akibatnya, penerapan informasi akuntansi sebagai pendukung penilaian kinerja keuangan oleh UKM di Ghana tidak efisien. |
| 3 | Sixpria <i>et al</i> (2014) | Implementasi Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Dalam Proses Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden mengakui pentingnya proses akuntansi dan pembuatan laporan keuangan untuk keberlanjutan perusahaan, namun belum diterapkan sesuai SAK ETAP karena beragam kendala, antara lain: keterbatasan pengelola UMKM mengenai pengetahuan akuntansi, jumlah pengelola UMKM yang masih terbatas, jumlah dana dan aktiva yang masih terbatas. UMKM di wilayah Depok belum menyelenggarakan proses akuntansi sesuai standar baku dan belum mengoptimalkan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. |
| 4 | Gunanto (2015) | Peranan Laporan Keuangan Dalam Rangka Memberdayakan Dan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan laporan keuangan yang ada di Kabupaten Sukoharjo masih menggunakan catatan sederhana bahkan tidak membuat catatan keuangan sama sekali, sehingga |

Dilanjutkan

Lanjutan

| | | | | |
|---|----------------------------|--|-----------------------|---|
| | | Dan Menengah Di Kabupaten Sukoharjo | | berakibat pada belum optimalnya pemanfaatan informasi akuntansi untuk pengembangan UMKM serta hambatan UMKM dalam penerapan laporan keuangan adalah kurangnya pengetahuan dan pelaku UMKM belum merasakan manfaat secara langsung dari penerapan akuntansi. |
| 5 | Kurniawansyah (2016) | Penerapan Pencatatan Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada UMKM Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi | Kualitatif | Persepsi pengusaha UMKM di Desa Gembongsari mengenai pentingnya keberadaan laporan keuangan, antara lain: pengusaha UMKM tidak memerlukan informasi akuntansi dan menyatakan pencatatan akuntansi adalah hal yang rumit; kebutuhan akan adanya catatan akuntansi dianggap hanya membuang waktu dan biaya. |
| 6 | Rudzani dan Charles (2016) | Penilaian Terhadap Tantangan Pengadopsian Dan Penerapan IFRS Untuk UKM Di Afrika Selatan | Kualitatif | Sebanyak 67% UKM di Distrik Vhembe telah mengadopsi IFRS untuk UKM meskipun demikian UKM masih menemukan tantangan yang sangat besar. Tantangan tersebut adalah rendahnya tingkat kesadaran, kurangnya pendidikan akuntansi, dan rendahnya kualitas SDM. |
| 7 | Hetika dan Mahmudah (2017) | Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan SAK ETAP | Deskriptif Kualitatif | Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pelaku UMKM di Kota Tegal masih sangat sederhana dan laporan keuangan belum sesuai dengan SAK |

Dilanjutkan

Lanjutan

| | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|
| | | Pada UMKM Kota Tegal | | ETAP disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai SAK ETAP. |
|--|--|----------------------|--|--|

Berdasarkan penelitian dari Narsa *et al* (2012), penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai kesiapan penerapan SAK EMKM. Persamaan penelitian Narsa *et al* (2012) dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tema dari penelitian ini, yaitu kesiapan penerapan suatu standar akuntansi terhadap UMKM. Sedangkan perbedaan penelitian Narsa *et al* (2012) dengan penelitian ini dapat dilihat dibawah ini:

1. Standar akuntansi yang diacu dalam penelitian kali ini adalah SAK EMKM.
2. Objek UMKM merupakan UMKM unggulan di Kecamatan Jombang.
3. Periode pengamatan adalah periode tahun 2018.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Kesiapan

Armenakis *et al* (dalam Herlina, 2013) mendefinisikan kesiapan (*readiness*) sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan. Sedangkan Holt *et al* (dalam Herlina, 2013) mendefinisikan kesiapan untuk berubah adalah sikap komprehensif yang mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi (contoh: apa yang sedang berubah), proses (contoh: bagaimana perubahan diimplementasikan), konteks (contoh: keadaan yang ada pada saat perubahan yang terjadi), dan individu (contoh: karakteristik individu yang diminta untuk berubah) melibatkan dan secara kolektif merefleksikan keluasan terhadap atau

sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk melakukan perubahan (dalam Herlina, 2013).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesiapan merupakan penanda terhadap perilaku individu untuk siap dalam menerima atau menolak sebuah rencana khusus untuk tujuan perubahan.

2.2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

1. Definisi UMKM

Definisi UMKM berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang, atau menjadi bagian dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang, atau menjadi bagian dari Usaha Kecil atau Usaha Besar.

2. Kriteria UMKM

Tabel 2.2 Kriteria UMKM

| Keterangan | Mikro | Kecil | Menengah |
|--|---------------------------|---|---|
| Jumlah Kekayaan Bersih (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan) | Maksimal Rp50.000.000,00 | Rp50.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00 | Rp500.000.000,00 s/d Rp10.000.000.000,00 |
| Hasil Penjualan Tahunan | Maksimal Rp300.000.000,00 | Rp300.000.000,00 s/d Rp2.500.000.000,00 | Rp2.500.000.000,00 s/d Rp50.000.000.000,00. |

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

3. Peranan UMKM

Berikut ini merupakan beberapa peran penting UMKM menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia (2015):

- 1) UMKM merupakan pemain penting di berbagai sektor dalam upaya perluasan bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) UMKM membantu negara sebagai penyedia lapangan kerja, pencipta pasar baru, sumber inovasi, serta terlibat dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- 3) UMKM sebagai menyumbang pendapatan nasional dan devisa negara sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

4. Kendala Bisnis UMKM

Berikut ini merupakan kendala yang sering terjadi pada UMKM menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia (2015):

1) Modal

Terdapat sekitar 60-70% UMKM belum mendapatkan akses pembiayaan perbankan. Hal tersebut disebabkan oleh keadaan geografis yang belum mampu dijangkau perbankan seperti berada di daerah terpencil dan manajemen UMKM yang belum dilakukan pemisahan antara keuangan untuk kegiatan operasional dan rumah tangga.

2) Sumber Daya Manusia

Adanya keterbatasan pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara penerapan *quality control* terhadap produk serta pemasaran produk masih menggunakan cara sederhana yaitu dari mulut ke mulut dan belum menggunakan media sosial sebagai alat promosi produk.

3) Hukum

Pada umumnya pelaku UMKM masih berbadan hukum perorangan.

4) Akuntabilitas

UMKM belum menerapkan sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

5) Iklim Usaha Belum Kondusif

Kurangnya koordinasi antar stakeholder UMKM seperti lembaga keuangan, lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dan asosiasi usaha menyebabkan tidak adanya titik temu antar stakeholder dan terkesan berjalan sendiri-sendiri.

6) Infrastruktur

Keterbatasan dalam sarana dan prasarana dalam kegiatan usaha khususnya dalam bidang teknologi menyebabkan mayoritas UMKM masih menggunakan teknologi sederhana.

7) Akses

Adanya keterbatasan terhadap akses bahan baku sehingga UMKM mendapatkan bahan baku dengan kualitas rendah.

2.2.3 Definisi Akuntansi

Warren *et al* (2015:) mengartikan akuntansi secara umum sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan yang menggambarkan kegiatan ekonomi dan keadaan perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Akuntansi merupakan “bahasa bisnis” (*language of business*). Akuntansi memuat informasi tentang bisnis perusahaan sehingga akuntansi dapat dijadikan alat komunikasi berbagai pihak yang berkepentingan. Kieso *et al* (2014) mengartikan akuntansi sebagai suatu sistem yang terdiri atas input data yang kemudian menghasilkan output berupa informasi dan laporan keuangan yang berguna bagi pihak internal dan eksternal. Berdasarkan hal itu, akuntansi dijabarkan ke dalam empat hal penting (Martani, 2017:4):

1. Input

Input dalam akuntansi adalah adanya transaksi yang melibatkan peristiwa ekonomik. Proses input tersebut membutuhkan bukti transaksi untuk mendukung pencatatan dan pembukuan transaksi.

2. Proses

Proses akuntansi mencakup serangkaian kegiatan identifikasi, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi menjadi laporan keuangan.

3. Output

Output akuntansi berupa laporan keuangan yang berisikan informasi keuangan suatu periode tertentu.

4. Pengguna informasi keuangan

Pengguna informasi keuangan dibedakan menjadi pihak internal dan eksternal entitas. Pihak internal berasal dari dalam entitas seperti manajemen dan karyawan, sedangkan pihak eksternal adalah mereka yang berasal dari luar entitas seperti kreditur dan pemerintah.

Sejalan dengan itu, Suwardjono (2014:10) juga menjelaskan akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan, yaitu akuntansi sebagai suatu perangkat yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada pihak yang mempunyai kepentingan organisasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu sistem yang meliputi input data berupa transaksi ekonomik, proses akuntansi kemudian menghasilkan output berupa laporan keuangan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.2.4 Peranan Akuntansi Bagi UMKM

Warsono (2010:8) berpendapat bahwa jika suatu UMKM menerapkan akuntansi dengan tepat dan semestinya maka UMKM dapat memperoleh beberapa informasi keuangan sebagai berikut ini:

1. Informasi Kinerja Perusahaan.

Informasi ini dapat dilihat pada laporan laba/rugi. Laporan tersebut mencerminkan bagaimana kemampuan UMKM dalam menghasilkan laba. Selain itu, laporan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis penyebab penurunan laba/rugi yang terjadi.

2. Informasi Perhitungan Pajak.

Berdasarkan pada laporan laba/rugi yang tersedia maka UMKM dapat menghitung secara akurat besaran pajak yang harus dibayarkan untuk periode tertentu.

3. Informasi Posisi Dana Perusahaan.

Informasi ini tercermin pada laporan posisi keuangan yang menyajikan penggunaan dana pada kelompok aset serta sumber perolehan dana yang berasal dari utang dan ekuitas.

4. Informasi Perubahan Modal Pemilik.

Berdasarkan laporan perubahan ekuitas yang tersedia, UMKM dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada sumber pendanaan, khususnya yang berasal dari ekuitas sehingga bermanfaat untuk mengetahui perkembangan modal pemilik di perusahaan.

5. Informasi Pemasukan dan Pengeluaran Kas.

Informasi ini dapat dilihat pada laporan arus kas yang mencerminkan pemerolehan dan penggunaan aset yang berupa kas.

6. Informasi Perencanaan Kegiatan.

Informasi ini didapat dari laporan anggaran (*budget*) yang menggambarkan kegiatan yang direncanakan beserta dana yang dibutuhkan dalam periode tertentu.

7. Informasi Besaran Biaya.

Akuntansi menghasilkan informasi mengenai beragam biaya yang dikeluarkan serta informasi lain yang berpengaruh pada pengeluaran biaya tersebut.

2.2.5 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik (IAI, 2014:3). Harrison (2011:3) menjelaskan laporan keuangan (*financial*

statements) merupakan dokumen bisnis yang berguna untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan perusahaan kepada beragam kelompok pemakai yang meliputi investor, manajer, kreditor, dan regulator untuk membuat berbagai keputusan.

SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana yang telah didefinisikan dalam SAK ETAP yang memenuhi definisi dan kriteria UMKM sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya 2 tahun berturut-turut (IAI, 2016:1).

Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK EMKM (2016:8) menjelaskan bahwa laporan keuangan EMKM minimum terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan memuat 3 informasi yaitu tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas di setiap akhir periode pelaporan. Unsur-unsur tersebut diartikan sebagaimana berikut ini:

- a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomik di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas.
- b. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik.

c. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas.

Laporan posisi keuangan entitas mencakup pos-pos berikut: kas dan setara kas; piutang; persediaan; aset tetap; utang usaha; utang bank; dan ekuitas. Pos-pos yang disajikan dalam SAK EMKM tidak harus diurutkan secara baku. Namun, entitas dapat menyajikan pos-pos aset sesuai urutan likuiditas dan urutan jatuh tempo untuk pos-pos liabilitas.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan informasi tentang pendapatan dan beban dari suatu entitas. Tujuan penyajian laporan laba rugi adalah untuk mengetahui kinerja keuangan entitas dalam suatu periode. Laporan laba rugi entitas mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan; beban keuangan; dan beban pajak.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi hal-hal sebagai berikut: suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM; ikhtisar kebijakan akuntansi; serta informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material. Informasi tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas.

Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis dan menggunakan dasar akrual. Biaya historis suatu aset

adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Dalam dasar akrual pos-pos diakui sebagaimana definisi dan kriteria dalam pengakuan untuk masing-masing pos.

Pengakuan dalam laporan keuangan SAK EMKM (2016:6) menurut Ikatan Akuntan Indonesia diatur sebagaimana berikut:

1. Aset

Pengakuan aset terjadi pada saat manfaat ekonomik di masa depan dapat dipastikan akan didapat oleh entitas. Aset tersebut juga harus mengandung biaya yang dapat dilakukan pengukuran secara andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan bila manfaat ekonomiknya dipandang tidak mengalir ke entitas walaupun pengeluaran telah terjadi. Oleh karena itu, transaksi tersebut memunculkan adanya pengakuan beban pada laporan laba rugi sebagai alternatifnya.

2. Liabilitas

Liabilitas diakui jika terdapat pengeluaran sumber daya, dimana sumber daya tersebut memiliki manfaat ekonomik yang dipastikan akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban entitas. Jumlah yang harus diselesaikan haruslah mampu diukur secara andal.

3. Penghasilan

Penghasilan diakui jika di masa depan terjadi kenaikan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas serta dapat diukur secara andal.

4. Beban

Beban diakui jika kenaikan manfaat ekonomik di masa depan yang berpengaruh pada penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi serta dapat diukur secara andal.

Sesuai persyaratan SAK EMKM (2016:7), penyajian laporan keuangan harus disusun secara wajar. Penyajian wajar berarti penyajian yang jujur atas segala transaksi yang tersaji dalam laporan keuangan. Penyajian wajar tersebut untuk mencapai tujuan:

1. Relevan

Relevan berarti pengguna dapat menggunakan informasi untuk menetapkan sebuah keputusan untuk kebijakan perusahaan.

2. Representasi Tepat

Informasi dalam laporan keuangan direpresentasikan secara tepat serta bebas dari kesalahan material dan bias.

3. Keterbandingan

Keterbandingan berarti informasi yang tersaji pada laporan keuangan dapat dibandingkan. Keterbandingan dapat dilakukan antar periode atau antar entitas guna mengidentifikasi trend yang terjadi pada posisi dan kinerja keuangan.

4. Keterpahaman

Keterpahaman berarti informasi yang tersaji dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna.

Penyajian dan penggolongan pos-pos dalam laporan keuangan entitas disusun secara konsisten. Entitas yang telah patuh pada SAK EMKM dalam pembuatan laporan keuangan dapat membuat pernyataan dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas menyajikan laporan keuangan secara lengkap pada akhir setiap periode pelaporan termasuk juga informasi komparatifnya, yaitu informasi satu periode sebelum tahun berjalan untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan.

2.3 Kerangka Konseptual



2.1 Gambar Kerangka Konseptual

Dari gambar kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dimulai dengan memilih UMKM yang akan dijadikan sebagai

objek penelitian. Setelah objek penelitian ditentukan yang dalam penelitian ini adalah UMKM unggulan di Kecamatan Jombang maka dilakukan penelitian lapangan. Penulis mencari tahu tentang penerapan akuntansi dan laporan keuangan yang dilakukan oleh UMKM unggulan serta hambatan dan kesiapan rencana penerapan SAK EMKM.

Apabila UMKM unggulan telah membuat laporan keuangan maka laporan tersebut akan dievaluasi untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan SAK EMKM atau belum sesuai. Setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bagaimana kesiapan UMKM unggulan dalam penerapan SAK EMKM di Kecamatan Jombang.